

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan penelitan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 terhadap kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Belinyu penerapannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan ketentuan yang ada masih belum sepenuhnya dipahami dalam kehidupan masyarakat. Sehingga menumbuhkan sistematika yang tidak berjalan secara optimal terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis memberikan saran, yaitu harus adanya tindakan tegas dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah, dalam menerapkan Implementasi yang ada agar membantu masyarakat dalam memahami aturan terkait pola tata ruang terutama dari wilayah kawasan hutan lindung, sehingga masyarakat tidak menjadi salah langkah kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adib Munawar dan Nawir, 2018, *Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan Dan Pengembangan (Studi Kasus di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan)*, Cetakan Pertama, Inti Mediatama, Makassar.
- A.M. Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Anton Silas Sinery, dkk, 2015, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Edisi 1, Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Deddy Pandji Santosa, 2020, *Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik*, Edisi 1, Inteligencia Media, Malang.
- Gamal Pasya, 2017, *Penanganan Konflik Lingkungan (Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Lampung)*, Cetakan 1, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardjanto, 2017, *Pengelolaan Hutan Rakyat*, Cetakan 1, Penerbit IPB Press, Bogor.
- H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan.*, Cetakan Pertama, Pustakan Pelajar, Yogyakarta.
- Khulfi M Khalwani, 2018, *Hutan Untuk Energi*, Cetakan Pertama, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Pramono Dwi Susetyo, 2021, *Seputar Hutan dan Kehutanan Masalah dan Solusi*, Cetakan 1, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Rahmat Safe'I dan Hari Kaskoyo, 2019, *Kesehatan Hutan: Pemantauan Kesehatan Hutan Pada Berbagai Fungsi Hutan*, Edisi Kedua;Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santun R.P.Sitorus, 2019, *Penataan Ruang.*, Cetakan 1, Penerbit IPB Press, Bogor.
- Sarintan E. Damanik dan Tengku Muhammad Sahudra, 2021, *Manajemen Wilayah Hutan*, Cetakan 1, Penerbit K-Media, Yogyakarta.
- Sarintan Efratani Damanik, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur.
- Syahrudin, 2018, *Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Yulius Hero, dkk, 2020, *Mengelola Hutan Lindung Berdasarkan Tipologi: Model Pengelolaan Hutan Lindung Masa Depan Indonesia*, Cetakan 1, Penerbit IPB Press, Bogor.

Jurnal :

Hastuti, dkk, 2021, “Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 2/No.1/Februari/2021/Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

Herpita Wahyuni dan Suranto, 2021, Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6/No.1/Tahun 2021, Departement of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Imam Yudhi Prastya, 2019, “Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Lindung”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 10/No.2/Oktober/2019, FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Peraturan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034.

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030.

Internet :

http://bappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/06.%20BAB%20I%20-%20PENDAHULUAN%20FIX.pdf

Diakses tanggal 30 September 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, Diakses tanggal 7 November 2022

<https://suduthukum.com/2017/09/asas-dan-tujuan-penataan-ruang.html>, Diakses tanggal 9 November 2022.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25039>, Diakses tanggal 11 November 2022

<https://bangkakab.bps.go.id/indicator/60/186/1/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan.html>,

Diakses tanggal 11 November 2022

Indah Novita Dewi , Achmad Rizal HB dan Priyo Kusumedi
<https://media.neliti.com/media/publications/29213-ID-implementasi-peraturan-tentang-pengelolaan-hutan-lindung-studi-kasus-di-kabupate.pdf>

Diakses Tanggal 30 September 2022.